BAB XII

RESTRUKTURISASI & PRIVATISASI BUMN

"RASIONALITAS EKONOMI DAN KEPENTINGAN POLITIK"

Oleh Dewi Triwahyuni

KONSEP &
LATAR BELAKANG BUMN

DEFINSI

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara Republik Indonesia

CIRI-CIRI BUMN:

1. Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha
2. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang sahan dalam permodalan perusahaan.
3. Pengawasan dilakukan oleh alat pelengkap negara yang berwenang
4. Sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka mensejahterakan rakyat

5. Sebagai sumber pemasukan negara
6. Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara
7. Modalnya dapat berupa saham, atau obligasi bagi perusahaan yang go public
8. Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun non bank
9. Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN dan mewakili BUMN di Pengadilan.

TUJUAN PENDIRIAN BUMN:

- Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan bagi kas negara,
- Pemenuhan hajat hidup orang banyak
- Mengejar dan mencari keuntungan
- Perintis kegiatan-kegiatan usaha
- Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan menengah.

LATAR BELAKANG LAIN:

- Pelopor atau perintis karena swasta tidak tertarik untuk menggelutinya
- Pengelola bidang-bidang usaha yang “strategis” dan pelaksana pelayanan publik
- Penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta yang besar.
- Hasil dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda.

TUJUAN UTAMA PEMERINTAH:

TUJUAN EKONOMI:

"BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu. Sehingga tercipta peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama yang hidup disekitanya."

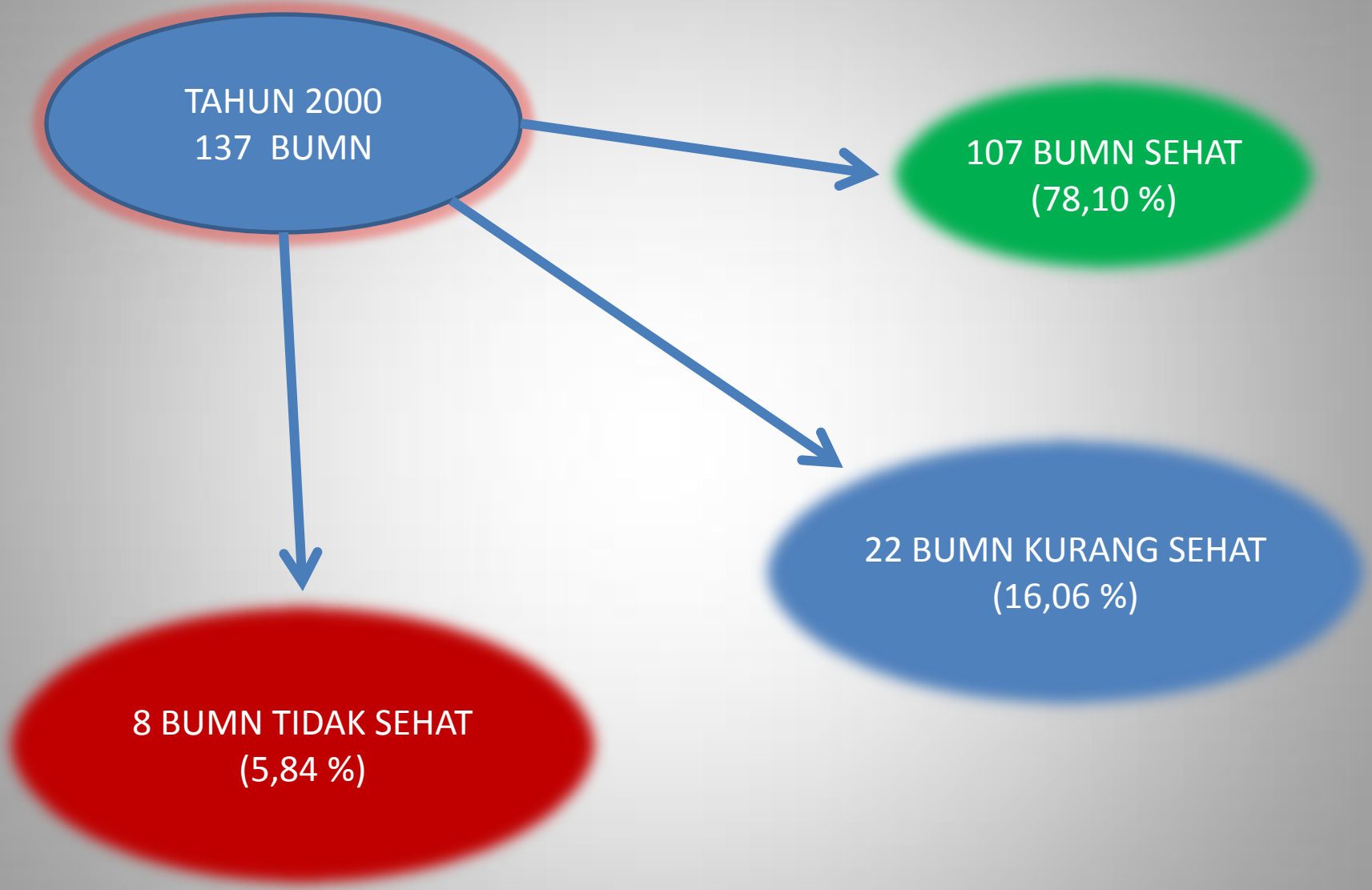
TUJUAN SOSIAL:

"Penciptaan lapangan pekerjaan serta upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal."

KINERJA BUMN DI INDONESIA

Kinerja BUMN dilihat dari Perolehan Laba (Juta) :

TAHUN	TOTAL ASSET	LABA BERSIH	ROA (Return Of Investment)
1997	425.927.407	310.092	1.72 %
1998	437.756.394	14.226.201	3.25 %
1999	607.022.845	14.271.101	2.35 %
2000	861.520.494	13.336.582	1.55 %
2001	845.186.151	20.186.469	2.39 %


TAHUN 2000
137 BUMN
107 BUMN SEHAT
(78,10 %)
22 BUMN KURANG SEHAT
(16,06 %)
8 BUMN TIDAK SEHAT
(5,84 %)

Kinerja Dilihat dari Sumbangan Ke APBN :

TAHUN	SUMBANGAN	KETERANGAN
2003	12,29 TRILYUN RUPIAH	TURUN
2004	7,8 TRILYUN RUPIAH	
2005	9,42 TRILYUN RUPIAH	NAIK
2006	12,3 TRILYUN RUPIAH	

KINERJA TAHUN 2004

- Penyumbang keuntungan tercatat hanya 10 BUMN:

  Telkom, Bank Mandiri, Pertamina, BNI, BRI, Pusri, Jamsostek, Pelindo, Astek.

- 55 BUMN merugi, antara lain:

  PLN, bulog, PELNI, Indofarma, Industri Sadang, PTPN, dan lain-lain,

BERBAGAI ALTERNATIF PENANGANAN BUMN :

Ada dua faktor yang menjadi kriteria dalam penanganan atau menata kembali BUMN, yaitu:

1. Eksternalitas, adalah manfaat ekonomi dan keberadaan BUMN yang dinikmati oleh pihak-pihak diluar BUMN yang bersangkutan, meliputi perusahaan-perusahaan lain & masyarakat pada umumnya.
2. Efesiensi, yaitu lebih dititik beratkan pada efesiensi waktu, teknis dalam lingkungan internal perusahaan.

PEDOMAN MENATA KEMBALI BUMN

EKSTERNALITAS

EFESIENSI	RENDAH	TINGGI
RENDAH	Likuidasi/Jual/Lego	-Korporatisasi: Peningkatan fungsi-fungsi manajemen - Rekayasa Ulang - Merger/akuisisi
TINGGI	Go Public / International	- Pertahankan - Go Public - Go International

KEDUDUKAN BUMN DI MASA KRISIS (1997/1998)

- Krisis Finansial diawali pada tahun 1997
- Rezim Orde baru pada saat itu meminta bantuan IMF
- IMF mentargetkan pada September 1998 cetak biru (blue print) privatisasi selesai
- Lahirlah Tap. MPR No.IV/MPR/1999 : Menetapkan bahwa arah kebijakan tentang BUMN adalah menata BUMN secara efesien, transparan dan profesional terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk privatisasi melalui pasar modal."

- Saat itu, privatisasi dianggap sebagai solusi terhadap defisitnya APBN, dimana diharapkan dengan mem-privat kan BUMN, banyak yang berinvestasi di BUMN tersebut sehingga usahanya kembali terbangun dan tentu saja peningkatan pendapat untuk menambang kas negara sangat diharapkan bisa tercapai.

PRIVATISASI BUMN : RASIONALITAS EKONOMI

- Dihampir semua nmur dan negara dunia ketiga, krisis ekonomi selalu diikuti oleh gelombang privatisasi, seperti Amerika Latin, Eropa Timur dan Asia Tenggara karena dianggap manjur bagi usaha pemulihan ekonomi.

- Namun privatisasi tidak mudah dijalankan, salah satunya karena pro & kontra yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Alasan Pihak Yang Menolak:

1. Privatisasi dianggap merugikan negara
2. Privatisasi pada pihak asing dianggap tidak nasionalis
3. Belum adanya bukti tentang manfaat yang diperoleh dari privatisasi

Kekhawatiran lain juga muncul dari kelompok khusus:

1. *Direksi BUMN*, khawatir privatisasi menyebabkan hilangnya jabatan, fasilitas dan kemudahan yang mereka miliki selama ini, termasuk kesempatan korupsi

2. *Pemerintah Daerah*, mengkhawatirkan privatisasi BUMN menyebabkan Pemda kehilangan sumber penerimaan pendapatan.

PRIVATISASI

DEFINISI

Privatisasi (cetak biru BUMN 2002-2006) adalah penyerahan kontrol kolektif dari sebuah perseroan (BUMN) kepada manajer dan pemilik swasta dan biasanya terjadi apabila mayoritas saham perusahaan diahlikan kepemilikannya kepada swasta.

Privatisasi mengandung Makna:

1) Perubahan peranan pemerintah dari peran sebagai pemilik dan pelaksana menjadi regulator dan promotor dari kebijakan /serta penetapan sasaran baik nasional maupun sektoral.
2) Para manajer selanjutnya akan bertanggung jawab kepada pemilik baru
3) Pemilihan metode dan waktu privatisasi yang terbaik bagi BUMN pada kondisi pasar dan kebijakan regulasi sektoral.

Pihak yang mendukung / Pro pada Privatisasi, melihat:

- Privatisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMN serta menutup defisit APBN.
- Privatisasi mendorong BUMN beroperasi secara profesional
- Investor yang baru pasti akan berupaya untuk bekerja efesien secara optimal agar mendapat keuntungan

Perlukah privatisasi dilakukan ?

Privatisasi dapat mendatangkan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia apabila setelah privatisasi BUMN mampu bertahan hihup dan menghasilkan keuntungan.

Oleh karenanya Privatisasi BUMN diharapkan memberikan output :

1. Mampu meningkatkan kinerja BUMN
2. Mampu meningkatkan prinsip *Good Governance*
3. Mampu meningkatkan akses ke pasar Internasional
4. Terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Terjadinya perubahan budaya kerja
6. Mampu menutup defisit APBN

STRATEGI PRIVATISASI BUMN:

a) Privatisasi melalui Pasar Modal
b) Privatisasi melalui Private Placement oleh Investor Dalam Negeri dengan penyertaan dibawah 50%
c) Privatisasi melalui Private Placement oleh Investor Dalam Negeri dengan penyertaan diatas 50%
d) Privatisasi melalui Private Placement oleh Investor Luar Negeri dengan penyertaan dibawah 50%
e) Privatisasi melalui Private Placement oleh Investor Dalam Negeri dengan penyertaan dibawah 50%
f) Privatisasi melalui Private Placement oleh Investor Luar Negeri dengan penyertaan diatas 50%